BAB IV

RESPON MASYARAKAT TENTANG TERBENTUKNYA GERBANG SALAM DI KABUPATEN PAMEKASAN

A. Perkembangan Gerbang Salam (Penerapan Syari'at Islam) di Kabupaten Pamekasan

Dalam perkembangannya, implementasi desentralisasi dan otonomi daerah ini ternyata direspon sangat beragam dan berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Di satu sisi hal itu merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah itu sendiri, namun di sisi lain menunjukkan bahwa otonomi daerah telah mendorong banyak pemerintah daerah melakukan kebijakan yang seringkali susah untuk dipahami masyarakat, bahkan oleh berbagai kalangan ahli sekalipun.

Salah satu hasil kebijakan publik di daerah adalah Perda. Sudah tentu lahirnya Perda sangat bersinggungan dengan kepentingan daerah bersangkutan. Perda yang kini cukup menjadi isu untuk ditelaah adalah Perda yang mengacu dan bernuansa pada Syariah yang sudah diundangkan diberbagai daerah. Secara teoritis suatu kebijakan publik diproyeksikan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik dan bukan masalah-masalah privat. Masalah dalam konteks kebijakan publik berarti adanya kondisi dan situasi yang secara formal menghasilkan kebutuhan atau ketidakpuasan dalam masyarakat sehingga perlu dicari cara-cara penanggulangannya. Dari perumusan definisi masalah tersebut, tidak lantas semua masalah yang muncul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kehidupan manusia dapat dijadikan sebagai dasar kelahiran suatu kebijakan publik. Hanya masalah publiklah (masalah-masalah yang tidak dapat diatasi secara pribadi) yang dapat dipergunakan sebagai dasar perumusan suatu kebijakan.[45]

Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) ini meliputi tiga bidang garapan yaitu bidang Aqidah, syariat dan akhlaq. Dari ketiga aspek tersebut diharapkan dapat menghasilkan pribadi muslim yang kamil dan syamil. Dengan beberapa misi yaitu membangun keluarga sakinah, membangun nuansa pendidikan yang Islami dan aparatur pemerintah yang Islamii, sehingga terwujud tatanan masyarakat yang Islami serta kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Diantara strategi yang digunakan adalah membangun movifasi kondusif bagi terciptanya perilaku dan sikap yang Islami serta membentuk kelompok pelopor sebagai penggerak pelaksanaan Gerbang Salam.[46]

Selain program umum yang meliputi aqidah, syariah dan akhlaq, terdapat beberapa program pokok yaitu:

1. Bidang Pendidikan, yaitu membangun kebijakan yang mengarah pada pembangunan sistem pendidikan yang Islami.
2. Sosial budaya, yaitu dengan membuat kebijakan yang mengarah pada kerangka "Amar ma'ruf nahi mungkar", seperti menutup aurat, dan shalat berjama'ah.

[45] Pudjo Suharso, "Pro Kontra Immplementasi Perda Syariah: Tinjauan Elemen Masyarakat" Al-Mawarid (XVI, 2006), 2.
[46] Erie Hariyanto, "Gerbang Salam: Telaah atas Pelaksanaanya di Kabupaten Pamekasan" Karsa (April 2009), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kesehatan dan keluarga, yaitu dengan mengusahakan kebijakan yang mengarah pada pembangunan kesehatan dan keluarga yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.[47]

Beberapa tokoh masyarakat kemudian mengadakan pertemuan khusus untuk membahas masalah yang dianggap meresahkan masyarakat Pamekasan, dan memerlukan formulasi hukum. Pertemuan khusus tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan diadakannya kajian, mengadakan seminar. Kemudian dari pertemuan ini memunculkan ide perlunya lembaga yang konsen menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga dibentuklah LP2SI (Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam) pada tahun 1999. Dengan keputusan Bupati Pamekasan No.188/126/441.012/2002.[48] Setelah diresmikan, LP2SI sebagai lembaga dibawah naungan pemerintah, kemudian menggagas konsep Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) sebagai motto dari upaya pemberlakuan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya Gerbang Salam dijadikan alat atau media dalam mensosialisasikan dan menerapkan hukum Islam yang dirancang oleh LP2SI. Lembaga ini dibentuk dan berdiri bukan semata-mata atas kemauan pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri, melainkan kebutuhan masyarakat yang mayoritas muslim.

Kesempatan ini tentu tidak disia-siakan karena seluruh tokoh masyarakat maupun ormas-ormas Islam menginginkan perubahan yang tidak hanya dimulai dari tingkatan *grass root* yang sudah dibangun dari dulu, tapi

[47] Ibid., 79-80.
[48] Tim LP2SI, Mengenal Gerbang Salam (Pamekasan: LP2SI, 2010), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem yang lebih mengarah dan mempunyai kekuatan hukum harus diperbaiki, karena menurut para tokoh agama dinilai sudah tidak efektif dalam mengontrol pola tatanan kehidupan masyarakat Pamekasan yang semakin kompleks.

Gerbang Salam bermula dari adanya wacana miring bahwa, masyarakat Pamekasan telah kehilangan jati dirinya. Banyak orang muslim melakukan perbuatan yang dilarang syari'at. Seperti semakin meningkatnya prostitusi, pemerkosaan, dan banyak wanita yang tidak sungkan mempertontonkan auratnya. Semua itu menurut para ulama disebabkan oleh hilangya jati diri mereka sebagai orang muslim, dan tidak menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan sebenarnya telah melanggar syari'at. Gagasan Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan ajaran Islam yang begitu sempurna itu tidak terhenti hanya pada tataran nilai, tataran teologis dogmatis, serta tataran aqidah belaka, namun secara bertahap mampu diaktualisasikan pada tataran amaliyah, diaplikasikan dalam keseharian hidup, dan ditransformasikan dalam gerak-gerik nyata pada aspek dan pola hidup masyarakat, mendapat respon baik dari para ulama dan tokoh masyarakat, sebagaimana terungkap pada acara pertemuan rutin ulama' umara' pada tanggal 16 Juli 2002.[49]

Masuknya Perda Syari'ah atau yang lebih diistilahkan dengan Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) di kabupaten Pamekasan telah memberi arus politik baru dan nuansa baru baik ditingkatan elit politik

[49] Erie Hariyanto, "Gerbang Salam: Telaah atas Pelaksanaanya di Kabupaten Pamekasan" Karsa (April 2009), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun masyarakat biasa, tidak hanya didataran hukum, namun simbol-simbol yang berbau Islam pun tampil kepermukaan. Dalam konteks Perda Syariah ini kita bisa membagi masyarakat menjadi dua golongan, yaitu Pro (yang mendukung) dan Kontra (yang menolak). Kelompok yang Pro berharap perda syariah dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah yang membelit bangsa dewasa ini. Harapan ini tampaknya dipengaruhi oleh kegagalan Negara mengintegrasikan program-program politik, budaya, dan ekonomi, dengan sistem nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga kegagalan (kurang berhasilnya) modernisasi dalam berbagai bidang yang dilakukan negara. Bagi masyarakat yang kontra (yang menolak), Perda syari'ah dinilai antara lain mengganggu kerukunan antar umat beragama, tetapi bagi masyarakat yang setuju, menerapkan syariah lewat Perda dianggap sebagai perintah agama. Paling tidak ada sampai tahun 2006 sudah 22 Pemerintah Daerah yang memberlakukan Perda Syariah.

Pada umumnya berkaitan dengan masalah moralitas masyarakat, antara lain menyangkut masalah pakaian, jam keluar malam bagi perempuan, perzinaan, pelacuran, kumpul kebo, dan masalah-masalah seputar pemberantasan kemaksiatan serta kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Gerbang Salam bermula dari adanya wacana miring bahwa, masyarakat Pamekasan telah kehilangan jati dirinya. Banyak orang muslim melakukan perbuatan yang dilarang syari'at. Seperti semakin meningkatnya prostitusi, pemerkosaan, dan banyak wanita yang tidak sungkan mempertontonkan auratnya. Semua itu menurut para ulama disebabkan oleh hilangya jati diri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka sebagai orang muslim, dan tidak menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan sebenarnya telah melanggar syari'at.

Gerbang Salam sebagai model dan strategi dakwah, muatan Gerbang Salam meliputi pengertian, visi, misi, tujuan dan program pokok yang ditetapkan sebagai berikut:

6. Gerbang Salam singkatan dari Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami
7. Visi Gerbang Salam adalah terwujudnya masyarakat Pamekasan yang Islami sebagai landasan bagi terwujudnya Pamekasan "*Mekkas Jatnah Paksa Jenneng Dibi'*"
8. Misi Gerbang Salam adalah internalisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari selaras dengan filosofi hormat kepada *"Bupa' Babu' Guru Rato"*
9. Tujuan Gerbang Salam adalah untuk membudayakan nilai-nilai Islami dalam rangka:
    4) Membentuk individu dan keluarga yang Islami
    5) Memberikan pendidikan yang Islami, dan
    6) Membentuk aparatur pemerintahan, pelaku ekonomi dan penguasa yang Islami.
10. Program pokok Gerbang Salam adalah:
    g. Membangun keluarga yang Islami
    h. Membangun pendidikan yang Islami
    i. Membangun sosial budaya yang Islami
    j. Membangun lingkungan dan kesehatan yang Islami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Membangun aparatur pemerintahan yang Islami, dan

l. Membangun sosial ekonomi yang Islami[50]

Tujuan syariat/hukum Islam untuk memenuhi kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu apabila hukum positif yang tidak berasaskan al-Qur'an dan al-Hadis dibandingkan dengan tujuan hukum Islam, maka ditemukan bahwa tujuan hukum Islam lebih tinggi dan bersifat abadi artinya tidak terbatas kepada lapangan materi yang bersifat sementara. Sebab faktor-faktor individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya selalu diperhatikan dan dirangkaikan satu sama lain, dan dengan hukum Islam dimaksudkan agar kebaikan mereka semua dapat terwujud.[51] Tujuan hukum Islam dimaksud dapat dilihat dari dua aspek yaitu: aspek pembuat hukum Islam, dan aspek manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Islam. Hal itu diuraikan sebagai berikut:

1) Kalau dilihat dari aspek pembuat hukum Islam, maka tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier. Salain itu adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan kamampuan manusia untuk memahami hukum Islam melalui metodologi pembentukannya.

2) Kalau dilihat dari segi aspek pelaku hukum yakni manusia, maka tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Caranya,

[50] Pemerintah Kabupaten Pamekasan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 188 Tahun 2009.Tentang Penetapan Gerbang Salam Sebagai Model dan Strategi Dakwah.
[51] Ibid,. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Singkat kata adalah untuk mencapai keridhaan Allah dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[52]

Munculnya Perda syariat di Pamekasan memiliki alasan yang berbeda. Pamekasan tidak memiliki rujukan historis dengan kelompok atau gerakan tertentu yang menginginkan pendirian negara Islam dan terdiri dari masyarakat yang mayoritas memiliki afiliasi kepada organisasi kemasyarakatan Nahdhatul Ulama (NU), yang dikenal tidak mendukung penerapan syariat Islam.[53] Di samping itu, dalam catatan sejarah, Pamekasan jarang sekali mengalami kekerasan berbasis agama meskipun bukan berarti tidak ada sama sekali. Madura dikenal sebagai daerah yang memiliki kultur keislaman yang moderat meskipun fanatik. Begitu pula, di Pamekasan tidak banyak dijumpai kelompok-kelompok Islam radikal semisal Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad maupun kelompok Islam lainnya yang bercita-cita mendirikan negara Islam. Meski demikian, di Pamekasan lahir lima Perda (Peraturan Daerah) dan Perbup (Peraturan Bupati) bernuansa syariat, yang tidak saja menyangkut persoalan publik tetapi juga persoalan privat.

Beberapa Perda dan Perbup tersebut adalah:

1. Perda Nomor 18 tanggal 32 November Tahun 2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol;

---

[52] Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 16.

[53] Agus Purnomo,"Politik Hukum Elite Politik Kabupaten Pamekasan tentang Perda Syariat" Justitia, (Desember 2013), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 tanggal 17 Juni Tahun 2004 tentang Larangan Terhadap Pelacuran;
3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 13 tanggal 27 Desember Tahun 2006 tentang Sistem penyelenggaraan Pendidikan Agama;
4. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188 tanggal 19 Oktober Tahun 2009 tentang Penetapan Gerbang Salam sebagai Model dan Strategi Dakwah.[54]

Dari uraian di atas, lahirnya Perda syariah di Pamekasan yang berkaitan dengan politik hukum elite politik menarik untuk dikaji, setidaknya dari aspek alasan yang melatarbelakangi elite politik menyusun Perda, dan persoalan yang dijadikan materi Perda.

Secara kultural, sebagian orang Islam di Pamekasan adalah santri karena menempuh pendidikan di pesantren. Bahkan, beberapa pejabat pemerintah daerah adalah juga alumni pendidikan pesantren. Sebagai contoh, Bupati Pamekasan sekarang, Ahmad Syafi'i merupakan alumni dari pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan. Di lembaga legislatif, beberapa anggota dewan juga pernah menempuh pendidikan di pesantren, antara lain adalah Zuhaini Rachim, ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang merupakan alumni Pesantren "Miftahul Ulum" Bettet dan "Pesantren Nurul Hikmah" Kayu Manis Pamekasan. Begitu juga dengan Bupati Pamekasan sebelumnya yakni, KH. Kholilurrahman yang seluruh jenjang pendidikanya di pesantren. sebagai santri, masyarakat Pamekasan sangat menghormati kiai tidak terkecuali

[54] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang kepada kiai di Pamekasan terasa lebih kuat. Terdapat tiga alasan yang memberikan menjadi pejabat di Pamekasan. Bahkan, dibandingkan daerah lain penghormataan legitimasi bagi kuatnya peran kiai di Pamekasan, yaitu:

1. Para kiai di Pamekasan memiliki jaringan kekerabatan yang luas, baik melalui kekerabatan pernikahan antar keluarga kiai, hubungan santri kiai, maupun jaringan kesamaan organisasi. Kuatnya jaringan kekerabatan diantara kiai seperti di Pamekasan menunjukkan bahwa seorang kiai memiliki basis massa yang besar. Hal ini memberikan implikasi bahwa kiai layak untuk dihormati dan ditaati karena mereka memiliki pengaruh besar, termasuk untuk penggalangan massa.
2. Pengaruh ketokohan dan kharisma Almarhum kiai Kholil dari Kabupaten Bangkalan adalah faktor lain yang mendorong ketaatan masyarakat Madura pada umumnya termasuk di Kabupaten Pamekasan terhadap kiai tersebut. Peran kiai Kholil Bangkalan sebagai guru bagi para ulama besar di Madura dan Jawa, mencitrakan sosok kiai yang harus ditaati.
3. Di Pamekasan, kiai termasuk dalam golongan *"oreng dhalem"* (orang dalam) yang secara historis mempunyai kedudukan sosial tinggi karena memiliki garis keturunan dari keluarga keraton.[55]

Dalam konteks ketaatan kepada kiai, politik hukum yang menghendaki lahirnya Perda syariat di Pamekasan memiliki hubungan yang sangat erat. Secara historis, Perda syariat di Pamekasan berawal dari keinginan kuat para

[55] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kiai untuk membuat peraturan yang bersumber dari nilai-nilai Islam yang disuarakan oleh partai melalui wakilnya di legislatif maupun langsung kepada eksekutif. Sementara itu, pada saat yang sama para elit legislatif dan eksekutif di Pamekasan adalah santri yang memiliki ketaatan yang tinggi kepada kiai, sebuah tradisi hubungan santri-kiai di pesantren.

Pamekasan adalah daerah yang sebagian besar masyarakatnya berafiliasi dengan ormas Islam NU. Meskipun demikian, sikap dan tindakan mereka berbeda dengan daerah lain yang juga memiliki penganut ormas Islam NU besar. Apabila mayoritas warga NU di beberapa daerah tidak mendukung gagasan penerapan syariat Islam, maka tidak demikian halnya dengan masyarakat Pamekasan. Sikap NU Pamekasan yang berbeda dengan NU di daerah lain tidak dapat dilepaskan dari sisi historis dan *setting* budaya yang ada. Secara historis, NU Pamekasan memiliki kedekatan dengan SI (Serikat Islam), yang *notabene* memiliki ideologi yang berbeda. Dalam sejarah awal Pamekasan, NU dan SI adalah dua ormas yang sudah sejak lama ada, yaitu sejak masa kerajaan di Pamekasan. Tokoh-tokoh NU dan SI di Pamekasan berasal dari akar genealogi yang sama, yaitu kiai Isbat. Beberapa pesantren besar di Pamekasan, baik yang berafiliasi kepada NU maupun SI memiliki akar genealogis yang sama yaitu keturunan kiai Isbat, melalui jalur kedua puteranya yaitu Nashruddin dan Abdul Hamid. Dari jalur Nashruddin berdiri beberapa pesantren yang berafiliasi ke NU, seperti pesantren Miftahul Ulum Panyeppen dan Miftahul Ulum Bettet. Sementara itu, dari jalur Abdul Hamid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang beberapa pesantren yang memiliki afiliasi ke SI, yakni pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dan pesantren Darul Ulum Banyuanyar.[56]

Dari waktu kewaktu gerbang salam memberikan pengaruh positif terutama meningkatnya pendidikan islam yang diwarnai dengan semakin banyaknya pesantren yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jumlah tersebut merupakan fakta terpenting bahwa sejak Gerbang Salam tidak hanya menjadi jargon Kabupaten Pamekasan, namun disertai dengan implementasi yang sangat kental bagi masyarakat Pemekasan.

Pesantren merupakan suatu hal yang sudah menjadi fenomena yang dapat dijumpai diberbagai daerah di Kabupaten Pamekasan. Bertambahnya lembaga pendidikan pesantren sudah meluas didesa-desa disetiap kecamatan-kecamatan sepert : Kecamatan Kadur terdiri dari 15 pondok pesantren yang terletak di Desa Kadur, Sumber Gayam, Bungbaruh, Bangkes dan Pamoroh. Hal ini juga dapat dijumpai di kecamatan tetangga yang juga mengalami peningkatan lembaga pendidikan islam yaitu: Kecamatan Larangan yang memiliki 9 pesantren yang ada didesa Blumbungan, Grujugan, Montok, Sumber Nangka, Panagguan dan Tentenan Timur.

Di Kecamatan yang lain seperti Batu Marmar terdapat 12 pondok psantren yang tersebar di Desa Bujur Tengah dan Ponjanan Timur. Di tempat atau daerah yang paling pelosok pun saat ini sudah memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperdalam ilmu pengatahuan umum dan agama karena didukung oleh akses yang mudah terjangkau karena banyaknya

[56] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren yang sudah didirikan dan dikembangkan oleh para tokoh agama dan Kyai dalam meningkatkan pendidikan Islam dan moral.[57]

1. Bidang Pendidikan

Seiring berjalannya waktu Gerbang Salam juga berpengaruh terhadap sistem pendidikan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Hal tersebut dapat terlihat dari munculnya peraturan wajib menggunakan pakaian bernuansa Islami seperti berjilbab, rok panjang, celana panjang dan simbol-simbol Islam yang lain. Disamping itu, pendidikan agama disekolah-sekolah semakin diintensifkan baik secara meteriil maupun lembaga yang dibentuk yaitu munculnya Madrasah Diniyah (Madin) dan dimasukkannya materi-materi keislaman seperti tafsir, kitab Fathul Qorib dan kitab-kitab yang lain serta pemantapan pendidikan Al-Qur'an di setiap lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Dalam penerapannya setiap lembaga pendidikan saat ini telah disediakan pula mushalla atau masjid sebagai tempat shalat berjama'ah bagi siswa sebagai upaya penanaman nilai-nilai keislaman dalam kehidupan siswa agar mereka terbiasa terlatih peribadatannya serta terciptanya siswa yang berbudi luhur.

Untuk mencapai tujuan pendidikan, tentunya diperlukan konsep dan strategis yang matang serta aspek-aspek lain yang mendukung. Hal itu dikarenakan, selama ini pendidikan di Indonesia hanya menitikberatkan pada keterampilan verbal dan logika matematika. Dan tak dapat dipungkiri

[57] Kementerian Agama Kantor Bupati Pamekasan, Data Pondok Pesantren tahum 2010 se Kanupaten Pamekasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pendidikan cenderung ber-orientasi materialistis, yaitu sebuah kecenderungan yang hanya menghasilkan manusia memiliki keterampilan untuk memenuhi masyarakat industrial. Mencetak kader-kader terampil hanya untuk memenuhi aspek kebutuhan hidup dari produk modernitas dan mengorbankan dimensi yang esensial dari kemanusiaan yaitu dimensi rohani. Keberhasilan pendidikan di era Otonomi Daerah ditentukan oleh berbagai kebijakan maupun produk politik. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama semua elemen bangsa. Dari unsur terkecil keluarga, masyarakat dan Pemkab beserta seluruh jajaran akan menghasilkan produk pendidikan yang berkualitas yaitu dengan jalan memperhatikan pentingnya penerapan pendidikan agama dan implementasi budaya lokal. Sehingga dapat mencetak SDM yang handal sekaligus memiliki rasa cinta pada budaya daerah, ber-wawasan luas, menguasai IPTEK, beriman dan bertaqwa.

Melalui pintu pendidikan, Gerbang Salam yang dicanangkan oleh Pemkab Pamekasan akan menjadi sebuah kenyataan. Keberhasilan cita-cita mulia itu dapat di raih apabila sektor pendidikan dijadikan prioritas utama dalam memberdayakan masyarakat. Dan pola pembangunan yang dicanangkan lebih menitikberatkan pada pembangunan serta pengembangan sumber daya manusia dan bukan pada pembangunan fisik semata. Dan tentu saja, dana yang dialokasikan untuk pendidikan lebih besar dari dana pembangunan lainnya. Sehingga semua lapisan masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minoritas, masyarakat terbelakang dan masyarakat tidak mampu bisa menikmati dan mengenyam pendidikan.

2. Kebijakan tentang tempat-tempat wisata

Objek wisata disetiap daerah menjadi sumber pendatan bagi daerah tersebut. Namun ketika pengelolaannya tidak diselaraskan dengan tata kelola yang baik dan benar maka akan menimbulkan dampak yang dapat merugikan bagi masyarakat. Sebab, banyak fakta dilapangan objek wisata dijadikan sebagai tempat aktivitas berbau maksiat seperti pergaulan bebas dan bentuk maksiat lainnya. Seperti halnya yang terjadi di Pantai Jumiang, Pantai Talang Siring, Api Tak Kunjung Padam dan tempat wisata lainnya. Sehingga sebagai upaya penertiban dari fenomena tersebut pemerintah mengatur jadwal pembukaan setiap tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Pamekasan yang rawan dengan kegiatan-kegiatan yang dilarang agama. Berkaitan dengan hal tersebut, pembukaan tempat-tempat wisata hanya diperbolehkan dibuka dari pagi jam 08:00 WIB sampai dengan jam 22:00 WIB dengan mensiagakan Satuan Polisi Pamong Praja (SALPOL PP) untuk menjaga keamanan dan ketertiban disetiap tempat wisata tersebut. Dengan demikian Gerbang Salam menjadi dasar utama dalam pemberlakuan peraturan tersebut.

3. Kebijakan dalam Institusi Pemerintah Daerah

Sebelum diberlakukannya Gerbang Salam, para aparatur daerah tidak memiliki kewajiban untuk berjilbab. Namun pasca dideklarasikannya perda Gerbang Salam, semua SKPD diwajibkan mengenakan kerudung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta wajib shalat berjama'ah bagi yang beragama islam karena pemerintah daerah telah menyediakan mushalla khusus disetiap instansi yang yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dalam aplikasinya para SKPD tidak diperbolehkan melanjutkan tugas/kerja ketika waktu shalat sudah tiba. Sehingga kondisi ini menjadi kebiasaan tersendiri bagi para aparatur pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Pamekasan.

B. Respon Masyarakat Muslim dan Non Muslim

Pemberlakukan Perda syariat Islam, bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Kabupaten Pamekasan. Penerapan syariat Islam tidak harus dituangkan berupa aturan formal seperti peraturan daerah (PERDA) atau undang-undang, tapi cukup dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin Penolakan Perda syariat Islam oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Madura yang banyak mengingatkan sikap Pro dan Kontra rencana penerapan syariat Islam melalui program Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan enam tahun yang lalu.[58]

Upaya penertiban sebagaimana diatur dalam Perda Gerbang Salam merupakan langkah-langkah pemerintah untuk meminimalisir hal-hal yang berbau maksiat dan kemungkaran. Namun, hal ini tidak dapat dipahami sebagai propaganda dan ancaman bagi umat non Islam yang ada di Pamekasan. Akan tetapi, hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial masyarakat Pamekasan yang semakin bertolak belakang dengan ajaran-ajaran

[58] Erie Hariyanto, "Gerbang Salam: Telaah atas Pelaksanaanya di Kabupaten Pamekasan" Karsa (April 2009), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam serta maraknya pergaulan bebas, minuman keras dan perjudian. Beberapa kalangan masyarakat memang sangat mendukung program pemerintah ini *(Perda Gerbang Salam)*, Taufan Ahmadi, S.Hi (mantan anggota DPRD Pamekasan periode 2009-2014), menyatakan :

> "ya bagus lah kalo pemerintah bisa peka dan paham kondisi sosial di Pamekasan, saya sih berharap Gerbang Salam ini bisa diterapkan dan gak hanya berupa slogan. Saya lihat banyak perubahan pasca diberlakukannya Perda ini, lambat laun masyarakat mulai sadar dan mau berubah. saya berharap Gerbang Salam akan membawa Pamekasan lebih baik kedepan dan tidak menimbulkan sikap dan tindakan negatif".[59]

Terbentuknya Gerbang Salam sebagai salah satu simbol penegakan syariat Islam di Pamekasan tidak serta merta harus menghilangkan rasa toleransi terhadap agama-agama selain Islam yang ada di Pamekasan. Akan tetapi, memberikan kesempatan kepada semua masyarakat Pamekasan untuk menjalankan ibadah dan spiritual sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Meskipun Gerbang Salam telah diberlakukan, namun dalam hal ini tidak ada unsur pemaksaan dan intimidasi karena masyarakat Pamekasan saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal tersebut terbukti dengan terbentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) sebagai media penyatuan dan keseragaman paradigma dan pemikiran masyarakat pamekasan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama umat beragama.

Forum Komunikasi umat beragama (FKUB) menjadi media untuk menjaga integrasi dan stabilitas umat beragama di Kabupaten Pamekasan. Kerukunan dan adanya bentuk saling kerjasama antar umat Islam dan umat

[59] Taufan Ahmadi, *Wawancara*, Pamekasan, 02 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama lainnya dapat terjalin ketika media ini berfungsi dengan maksimal. Karena dalam forum ini terdiri dari pimpinan dan tokoh agama di Kabupaten Pamekasan, dialog ditempuh sebagai upaya terciptanya keharmonisan hubungan antar umat beragama.

Secara definitif, dialog diatas dimaksudkan sebagai sebuah percakapan dari berbagai pihak agamawan untuk menyampaikan pandangan mereka secara tepat, sebaliknya mendengarkan mitra dialog secara terbuka, tanpa sikap apriori. Dialog di sini bukan ajang perdebatan apalagi pemaksaan kebenaran sendiri terhadap pihak lain. Akan tetapi, melalui dialog masing-masing pihak belajar dari pandangan dan pengalaman satu sama lain. Dengan dialog akan membuka kemungkinan bagi masing-masing pihak untuk melakukan perubahan dalam berinteraksi satu sama lain yang lebih terbuka, sedikitnya lebih memahami keyakinan, pemikiran dan masalah yang dihadapi mitra dialog. Keragaman keyakinan disini justru tidak dijadikan sebagai cara untuk mencari perbedaan, tetapi mencari persamaan menuju masyarakat yang rukun dan penuh toleransi satu sama lain.

Agama yang humanistik adalah agama yang selalu menekankan dimensi kemanusiaan atau berpusat pada manusia (antroposentrik). Karena di antara fungsi diturunkan agama adalah demi kemaslahatan manusia. Agama yang humanis harus bersikap terbuka, inklusif, dan positif. Bersikap terbuka tidak berarti menganggap semua agama sama. Keterbukaan berarti kesediaan untuk mengakui bahwa pandangan dan agama lain pun memiliki nilai meskipun kita sendiri tidak mengikutinya. Inklusif berarti bahwa kita bersedia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangun kehidupan bersama dalam satu masyarakat sedemikian rupa hingga semua warga, juga mereka yang beragama dan berkeyakinan lain dari kita, dapat merasa di rumah sendiri, dapat mendukung dan menyetujuinya. Negara adalah rumah kita, dan bersama dengan semua. Positif berarti bahwa orang dengan pandangan religius lain pun kita anggap sebagai saudara dan saudari sebangsa yang bernilai. Jadi kita mengiyakan dan menghargai kehadiran mereka dalam masyarakat.[60]

Orientasi keagamaan dan niatan yang dinilai mulia ini terkadang membuat semua lupa, jika di Kabupaten Pamekasan ini terdiri dari beberapa unsur dan elemen masyarakat yang beraneka ragam budaya, terutama agama. Keragaman ini tentunya menjadi ciri khas dan memiliki nilai positif bagi komoditas yang hidup di Kabuapaten Pamekasan. Terbentuknya Gerbang Salam ini di satu sisi akan berdampak lebih mendalam. Meskipun peraturan ini secara spesifik dan lebih dominan berlaku bagi umat Islam yang ada di Pamekasan namun dampaknya juga mengganggu dan merugikan komunitas agama yang lain.

Keragaman ini diakui atau tidak akan dapat menimbulkan persoalan dalam kontek kehidupan sosial seperti premanise, maksiat dimna-mana dan kejahatan. Sebagai Negara multikultural Indonesia serigkali dihadapkan pada persoalan-persoalan diatas sehingga memicu adanya upaya penyeragaman. Fenomena “Perda Syariah” yang diberlakukan di Pamekasan dituding sebagai upaya mengarahkan Negara ini ke dalam bentuk penyeragaman, yaitu Negara

[60] Moh. Asror Yusuf, *Agama Sebagai Kritik Sosial: di tengah Arus Kapitalisme Global* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), 40-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dengan menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum. Asumsi ini kemudian mengudang respon dan perdebatan di kalangan umat non Islam, seperti yang disampaikan oleh Nika Prihandini (informan yang beragama kristen) yang menyatakan :

> "Gerbang Salam ini gimana ya… saya perhatikan seolah-olah memberi keseragaman, contoh paling gampang kewajiban pake kerudung bagi wanita,,,, mungkin saat ini hanya orang Islam yang melakukan itu tapi bisa jadi suatu ketika Kristen dan agama lainya diharuskan juga pake kerudung,,, ya khan ??? nah, saya kira sekarang tidak terlalu mendalam kepada umat Kristen, tapi siapa tau nanti,,, ya gak????"[61]

Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) ini meliputi tiga bidang garapan, yaitu bidang Aqidah, Syariat dan Akhlaq. Dari ketiga aspek tersebut diharapkan dapat menghasilkan pribadi muslim yang kamil (sempurna) dan syamil (utuh/menyeluruh). Dengan beberapa misi yaitu membangun keluarga sakinah, membangun nuansa pendidikan yang Islami dan aparatur pemerintah yang Islami, sehingga terwujud tatanan masyarakat yang Islami serta kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Diantara strategi yang digunakan adalah membangun motivasi kondusif bagi terciptanya perilaku dan sikap yang Islami serta membentuk kelompok pelopor sebagai penggerak pelaksanaan Gerbang Salam.

Selain program umum yang meliputi Aqidah, Syari'ah dan Akhlaq, terdapat beberapa program pokok yaitu:

1. Pendidikan, yaitu dengan membuat kebijakan yang mengarah pada pembangunan sistem pendidikan yang Islami.

[61] Nika Prihandini, *Wawancara*, Pamekasan 17 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Budaya, yaitu dengan membuat kebijakan yang mengarah pada kerangka Amar ma'ruf nahi mungkar, seperti menutup aurat, dan sholat berjemaah.
3. Kesehatan dan keluarga, yaitu dengan mengusahakan kebijakan yang mengarah pada pembangunan kesehatan dan keluarga yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.[62]

Sebagai bentuk penerapan syariat Islam adalah Muslimah yang menggunakan jilbab semakin meningkat (terutama para pegawai di lingkungan Pemkab) dan instansi lainnya: namun demikian tidak berarti bahwa semua muslimat di Kabupaten Pamekasan sudah menggunakan jilbab. Di bidang perbankan sudah banyak perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang menggunakan prinsip pengelolaan syariah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Muamalat), BPR Syariah dan Pegadaian Syariah yang mampu menyumbangkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui sistem perbankan Islam yang berbasis syari'ah.

Pemberlakuan Gerbang Salam adalah aksi tindakan satuan polisi Pamong Praja (satpol PP) dalam melakukan razia secara rutin dilaksanakan seperti, melakukan razia terhadap hotel-hotel yang diperkirakan menjadi tempat prostitusi yang dilakukan kerjasama antara aparat kepolisian dan masyarakat merupakan bentuk kerjasama yang sinergi terhadap upaya membuni syariat Islam di kabupaten Pamekasan.[63]

Masuknya Perda syariah atau yang lebih di istilahkan dengan Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan telah memberikan arus politik baru dan

[62] Erie Hariyanto, "Gerbang Salam: Telaah atas Pelaksanaanya di Kabupaten Pamekasan" Karsa, (April 2009), 7-8.
[63] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nuansa baru baik ditingkat elit politik maupun masyarakat biasa tidak hanya di dataran hukum, namun simbol-simbol yang berbau Islampun juga tampil kepermukaan. Awal konsep keberadaan Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan adalah menjadikan Kabupaten Pamekasan menerapkan hukum syariat Islam secara utuh dan diharapkan mampu meminimalkan bahkan memberantas tindakan asusila yang kian marak terjadi.

Syari'at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. norma hukum dasar ini dijelaskan dan dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. karena itu, syari'at terdapat di dalam Al-Qur'an dan di dalam kitab-kitab Hadis.[64]

Syari'at Islam itu ibarat pisau bermata dua; bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mengontrol kekuasaan agar tidak melakukan kekerasan, tetapi juga dalam waktu yang sama juga bisa menjadi alat yang ampuh bagi kekuasaan untuk melakukan kekerasan. Jadi tergantung di tangan siapa Syari'at Islam itu ditafsirkan, diamalkan, dan digunakan sebagai landasan hukum, maka itulah watak dan wajah Syari'at Islam yang tampak.[65] Kerusuhan dan konflik memang tidak bisa dinafikan dari kehidupan manusia, akan tetapi ketika konflik sentimen agama bisa dikelola semaksimal mungkin seperti masyarakat Pamekasan yang mayoritas muslim militan dengan umat

---

[64] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: 1998), 41.
[65] Moh. Asror Yusuf, *Agama Sebagai Kritik Sosial: di tengah Arus Kapitalisme Global* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama lainnya yang tergolong minoritas. Penerapan program Gerbang Salam ini berpotensi terjadinya sentimen agama dan menjadi sumber penyebab konflik diantara pemeluk agama minoritas, konsep yang diterapkan murni dari hukum Islam, yang kemudian diformalkan dan dimasukkan kedalam peraturan daerah Kabupaten Pamekasan.

Pernyataan senada juga dilontarkan oleh Nika Prihandini (informan yang beragama Hindu) yaitu:

> "saya juga khawatir banget nanti akan semakin luas, artinya Gerbang Salam ini akan jadi pertanda buruk bagi agama minoritas, okelah.. sekarang belum tapi nanti takutnya akan semakin merajalela yang tadinya hanya himbauan dan slogan, malah erujung pemaksaan."[66]

Nika juga menjelaskan apaupun persoalan yang dihadapi sebagai akibat dari penerapan program atau peraturan baru tergantung bagaimana cara kita menyikapi dan memahami persoalan tersebut. Hal yang paling penting adalah sosialisasi yang jelas agar masyarakat dapat memahami dan mengerti maksud dari penerapan tersebut. Dengan demikian semua permasalahan dan kemungkinan buruk lainnya dapat diantisipasi dan diwaspadai secara bersama dengan penuh kesadaran dan berfikir jernih.

Berikut pendapat Kosala Mahinda (ketua Yayasan Tjandi Vihara Avalokitesvara), beliau mengatakan:

> "dengan adanya Gerbang Salam kan tidak semua harus Islam, dengan kata lain yang Islam jalankan sesuai ajaran agama Islam dan yang budha ya budha, bahkan dalam kenyataannya pendidikan agama yang ada di sekolah-sekolah pun disesuaikan dengan agama siswanya masing-masing. kalo misalkan harus pake kerudung, yang Islam ya pake aja, kita biasa-biasa aja, yang penting jangan kemudian Gerbang Salam dijadikan alasan untuk melakukan pemaksaan".[67]

---

[66] Nika Prihandini, *Wawancara*, Pamekasan 17 Oktober 2014.
[67] Kosala Mahinda, *Wawancara*, Pamekasan 21 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan Kosala di atas, dapat disimpulkan bahwa kerukunan antar sesama umat beragama memang seharusya dijunjung tinggi, karena Gerbang Salam bukan upaya pengkerdilan terhadap agama selain Islam, bahkan umat non Islam bisa merespon secara dewasa dan penuh *positive thinking*. Hal ini dapat dilihat dalam realita pasca diresmikannya "Gerbang Salam", seluruh masyarakat Pamekasan tetap kondusif dan tidak pernah terjadi gejolak sosial negatif. yang masyarakat sadar bahwa ini hanyalah upaya pemerintah untuk mensterilkan Pamekasan dari hal-hal negatif seperti perjudian, prostitusi, dan minuman keras, karena pada essensinya semua agama mengajarkan kebaikan dan melarang hal-hal diatas.

Respon dan argumentasi tentang Gerbang Salam ini memang marak diperbincangkan publik, seorang Dosen di Universitas Madura (UNIRA) Ibu Adriana Pakendek (informan yang beragama kristen) berpendapat :

> "saya sudah belasan tahun mengajar di Unira dan bahkan saya tahu saat deklarasi terbentuknya Perda Gerbang Salam itu, apa ya.. buat saya sah-sah saja yang penting Gerbang Salam ini bisa bedain aspek umum dan aspek khusus artinya hal-hal yang sifatnya mendasar jangan dijadikan objek untuk memicu perpecahan terutama perbedaan agama di Pamekasan, karena semua agama punya batas-batas tertentu yang memang tidak bisa disamakan. Tapi kalo ini untuk membangun ketertiban dari hal-hal yang jelek, malah saya sangat mendukung.[68]

Dukungan dan toleransi antar umat beragama sebagai bentuk kesadaran terhadap pluralistik dan keaneka ragaman budaya, agama dan kontek sosial masyarakat Pamekasan merupakan hal yang sangat penting, karena hal itu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kerukunan dan ketentraman bersama. Sikap Ke-BHINNEKA-an dalam segala hal merupakan kunci utama mencapai

[68] Adriana Pakendek, *Wawancara*, Pamekasan 02 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup damai dan penuh rasa menghargai satu sama lain. dalam kontek ini Adriana Pakendek (informan yang beragama kristen) mengatakan:

> "sebagai orang Kristen saya masih dipercaya untuk ngajar di kampus UNIRA ini, ini kan menunjukkan Perda Gerbang Salam tidak menimbulkan diskriminasi dalam kontek pendidikan, orang Pamekasan kan mayoritas Islam, tapi itu bukan alasan untuk bersikap gak adil sama umat Kristen dan umat bukan Islam yang lain, meskipun saya tahu kita adalah kelompok minoritas, ya.. semua bisa saling ngerti lah."[69]

Pernyataan Adriana sebagai umat Kristen di atas merupakan suatu hal yang positif bagi umat Islam, dimana ketika menginginkan perubahan di dalam sistem kehidupan masyarakat dengan menggunakan satu bendera mendapat respon positif dari agama lain. hal ini menggambarkan tingkat toleransi yang tinggi di tubuh umat Kristen di Kabupaten Pamekasan yang menginginkan untuk selalu hidup dan bardampingan dengan umat Islam. hal ini sebagaimana dikatakan *John Rawls*, toleransi adalah sebagai "metode pengelakan" (*method of avoidance*) bersisi ganda, yakni mengelak dari pemaksaan keyakinan sendiri atas orang lain dan tidak menolak orang lain memeluk dan mempraktekkan keyakinan mereka, termasuk menggunakan simbol-simbol yang di praktekkan umat Islam dalam penegakan nilai-nilai Islam seperti memakaian kerudung dan cara berinteraksi mereka.

Fenomena munculnya Perda syariah di Pamekasan adalah suatu mata rantai dengan lahirnya otonomi daerah. Penyerahan langsung yang diberikan kepada daerah, baik provinsi maupun Kabupaten/kota dimanfaatkan untuk membuat Perda dengan maksud melindungi, mempertahankan dan/atau menjaga berbagai karakteristik khas daerah Pamekasan, seperti halnya

[69] Adriana Pakendek, *Wawancara*, Pamekasan 02 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pamekasan yang secara mayoritas beragama Islam dimana antara agama Islam dan budaya masyarakat setempat berjalan searah, yang kemudian hal inilah yang memprakarsai munculnya Perda syariah yang dikenal dengan Perda Gerbang Salam sebagai produk hukum yang legal. seperti yang dikatakan Muhammad Warits Ardiansyah (salah satu alumni mahasiswa UNIRA Pamekasan) yaitu:

> "Adanya Gerbang Salam atau pemberlakuan syariat ini misalkan, dengan adanya pelarangan minuman keras itu minimal tidak ada orang yang minum-minuman keras dengan terang-terangan. panggung-panggung hiburan, bukan kesannya melarang, dan bukan anti seni karena panggung hiburan itu tidak murni hiburan tapi ada unsur-unsur lain yang dimasukkan. Unsur perusak moral, ada minuman. Jadi diatur, pertama jam tayang. Kalau ada hiburan disini itu waktunya dibatasi sampai jam sekian. Tempatnya kalau dekat dengan tempat ibadah itu kan tidak pantas. seperti Masjid Agung yang begitu besar didepannya ditempati hiburan ini yang kadang tidak dipahami dan dianggap mengada-ada oleh masyarakat. kalo Pemerintah bisa peka dan paham kondisi sosial di Pamekasan ya bagus, saya berharap gak hanya berupa slogan saja. dan saya benar-benar berharap Gerbang Salam akan membawa Pamekasan lebih baik ke depan dan tidak menimbulkan sikap dan tindakan negatif apalagi arogan."[70]

Jadi dialog diatas dimaksudkan sebagai sebuah percakapan dari berbagai pihak agamawan untuk menyampaikan pandangan mereka secara tepat. Dialog disini bukan ajang perdebatan apalagi pemaksaan kebenaran sendiri terhadap pihak lain, tetapi melalui dialog ini masing-masing pihak belajar dari pandangan dan pengalaman satu sama lain. Dialog membuka kemungkinan bagi masing-masing pihak untuk melakukan perubahan dalam berinteraksi satu sama lain, minimal lebih memahami keyakinan, pemikiran dan masalah yang dihadapi.

[70] Muhammad Warits Ardiansyah, *Wawancara*, Pamekasan 02 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id